



5% DPS Belum Kantongi KTP Elektronik

YOGYAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilwali Kota Yogyakarta 2017 sebanyak 303.034 jiwa. Hanya saja dari jumlah tersebut, 5% di antaranya diketahui belum mengantongi e-KTP. Syarat bisa memilih harus sudah memiliki e-KTP. Dari total DPS, sekitar 5% atau 15.483 jiwa yang belum merekam data kependudukan elektronik," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto, kemarin.

Menurutnya, warga yang masuk dalam DPS dan belum mengantongi e-KTP tak hanya berasal dari kalangan pemilih pemula yang baru akan berusia 17 tahun saat hari H pemilihan umum pada 15 Februari 2017 saja, tapi juga ada warga yang sudah wajib KTP namun hingga kini belum melakukan perekaman data kependudukan.

Terkait permasalahan ini, dalam waktu dekat ini KPU akan segera berkoordinasi de-

ngan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta untuk mengecek data kependudukan. Sesuai ketentuan, warga yang memiliki hak pilih tapi belum merekam data kependudukan, masih akan dilayani untuk perekaman paling lambat 27 November 2016. "Jika tidak merekam atau tidak ada keterangan dari Dindikcapil, kami terpaksa mencoret dari daftar pemilih," katanya.

Penetapan DPS oleh KPU tersebut masih akan diverifikasi untuk penetapan DPS Hasil Perbaikan yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwali Kota Yogyakarta 2017. "DPS akan diumumkan melalui RT/RW setempat. Warga dapat memberikan masukan terhadap DPS pada 10-19 November mendatang. Jadi masih dimungkinkan ada penambahan atau pengurangan data pemilih. Untuk DPT baru akan ditetapkan pada 8 Desember 2016," kata Wawan. Jumlah DPS yang ditetapkan

KPU itu lebih rendah dari data pemilih yang diverifikasi oleh petugas sebanyak 345.297 jiwa. Hasil verifikasi di lapangan, ditemukan adanya warga yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Terpisah, Kepala Seksi Penerbitan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Dindikcapil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo mengatakan, pihaknya akan membuat surat keterangan yang sudah melakukan perekaman tapi belum memiliki fisik e-KTP serta surat keterangan pemilih pemula yang belum melakukan perekaman namun tercatat dalam database kependudukan.

"Selama ada keterangan nanti tetap punya hak untuk ikut pilkada," katanya. Meski demikian, pihaknya tetap meminta warga Kota Yogyakarta yang wajib KTP tapi belum melakukan perekaman agar segera melakukan perekaman data e-KTP. Perekaman bisa dilakukan di seluruh kantor kecamatan.

Haryadi-Heroe Angkat Potensi Sungai

Sementara itu, kemarin pasangan calon wali kota-wakil wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi kembali melakukan kampanye berbentuk dialog bersama masyarakat. Kali ini paslon nomor urut dua itu menyambangi wilayah bantaran Kali Code di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan.

Saat dialog bersama warga, Haryadi-Heroe berjanji akan mengangkat potensi sungai yang ada di Kota Yogyakarta. Di antaranya sebagai wisata kuliner dan wisata air sehingga mampu mengangkat perekonomian warga setempat. Dengan syarat warga harus bisa menjaga kebersihan sungai dan bisa hidup berdampingan dengan sungai.

Paslon yang diusung koalisi Golkar, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, dan didukung PPP ini, menjanjikan di Kota Yogyakarta tak akan ada pengusuran warga bantaran

sungai. "Kami ingin mengoptimalkan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), kami fokuskan di bantaran sungai. Tidak ada pengusuran, hanya penataan," kata Heroe Poerwadi.

Menurutnya, warga sudah memahami konsep penataan bantaran sungai. Yaitu membuat bangunan baru yang lebih mundur menjauhi bibir sungai. Sehingga saat ini ada jalan inspeksi yang memisahkan bangunan milik warga dengan bibir sungai.

Haryadi-Heroe jika terpilih nantinya akan mencoba membuat jalur jalan dengan lebar tiga meter agar akses warga di permukiman sepanjang bantaran sungai semakin lancar. Diketahui selain Sungai Code, di Kota Yogyakarta terdapat dua sungai lainnya yaitu Sungai Gajah Wong dan Sungai Winongo. Di kanan-kiri aliran sungai tersebut tergolong kawasan padat permukiman penduduk.

Instansi
1. KPU Kota Yk
2. Din. Dindikcapil
3.
4.
5.

✓ Netral
✓ Biasa

Sifat	Tindak Lanjut
1. Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2. Jangka Panjang	☒ Untuk Diketahui
3. Jangka Menengah	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum			

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005